KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : DPR Gagal Yakinkan Urgensi Bangun Gedung Baru
**Tanggal** : Minggu, 20 Agustus 2017
**Surat Kabar** : Media Indonesia
**Halaman** : 3

# DPR Gagal Yakinkan Urgensi Bangun Gedung Baru

PENELITI Formappi Lucius Karus menilai kunjungan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Konstitusi hanya upaya DPR untuk merealisasikan pembangunan gedung parlemen yang baru.

Ia mempertanyakan mengapa kunjungan tersebut justru tidak dilakukan sejak awal sebagai bagian dari kajian pendahuluan DPR. "Kok setelah diprotes publik, baru BURT melakukan visitasi ke lembaga negara lain untuk meyakinkan publik soal perlunya DPR membangun gedung baru," kata dia.

Hal itu justru merupakan salah satu kelemahan DPR. Menurutnya, DPR gagal menunjukkan urgensi pembangunan gedung dengan alasan-alasan yang bisa meyakinkan publik.

"DPR selalu membawa lembaga lain agar rencana mereka didukung publik. Misalnya DPR juga mengklaim telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera). Namun, Kemen PU mengatakan mereka belum memberikan rekomendasi resmi. Jadi saya kira, bagi DPR, gedung baru ini harus dibangun sekarang, apa pun alasannya," ungkapnya.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Toto Sugiarto menyebut rencana pembangunan gedung DPR dan pembangunan apartemen pemborosan anggaran.

> "Rencana pembangunan gedung DPR dan pembangunan apartemen pemborosan anggaran."
>
> **Toto Sugiarto**
> Pengamat politik

Toto menyebut pembangunan gedung baru untuk ruangan staf sebetulnya tidak terlalu masuk ke hal yang sangat urgen. Perkara sempitnya ruang serta gedung miring pun, menurut dia, masih bisa diperdebatkan.

Penempatan staf pun bisa disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Menurutnya, tak semua anggota membutuhkan banyak staf. Toto juga tidak setuju dengan rencana pembangunan apartemen bagi anggota. Hal itu merupakan pemborosan besar-besaran karena para anggota sendiri sudah disiapkan rumah dinas.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat mengingatkan DPR akan adanya moratorium pembangunan gedung baru untuk pemerintah. Sehubungan dengan hal itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menyerahkan kepastian pembangunan gedung DPR kepada pemerintah yang dalam hal ini mengelola keuangan negara.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing mengatakan saat ini luas ruangan anggota dewan hanya 28 meter persegi yang disekat untuk dibagi dengan staf dan tenaga ahli yang berjumlah tujuh orang. Gedung Nusantara I itu dulu dibangun untuk 800 orang, sekarang sudah ada 4.000 orang rata-rata," ujar Anton. (Nov/Nur/Put/P-2)